ANALISIS DAMPAK PROGRAM SATU MILIAR SATU DESA (SAMISADE) TERHADAP PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Antary Fareza Bunga Pradhani
NPP. 33.0370
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: antarybungaaa@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputra ,S.Sos.,M.Si
Email: romisaputra@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap: *The author focuses on the problems of low accountability, limited village apparatus capacity, and unequal utilization of economic opportunities in the implementation of the One Billion One Village (SAMISADE) Program in Bogor Regency, despite its large budget allocation (IDR 1–1.5 billion per village per year) and proven physical achievements.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the implementation phenomenon of SAMISADE on village infrastructure and community economy, identify supporting and inhibiting factors, and formulate program optimization strategies.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data collection techniques include in-depth interviews with 11 informants (policy makers, village implementers, and beneficiary communities), participatory observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing using the ASOCA Theory (Ability, Strength, Opportunity, Culture, Agility).* ***Result****: The SAMISADE Program has had positive impacts: construction of 1,485 km of village roads, 1,344 m of bridges, retaining walls, and waste banks; the number of self-sufficient villages increased from 29 (2020) to 95 (2022); farmers' income rose from IDR 2 million to IDR 6–7 million per month; waste bank customers earn IDR 600,000–800,000 per month. Supporting factors include apparatus training, budget flexibility, mutual cooperation culture, and counter-cyclical policy. Inhibiting factors are material price hikes, uneven apparatus capacity, and procedural rigidity****.*** ***Conclusion:*** *The SAMISADE Program is effective but requires optimization through managerial capacity building, digital monitoring systems, SME development, and adaptive procedural flexibility.*

Keywords: *ASOCA Analysis; Community Economy; Community Empowerment; SAMISADE Program; Village Infrastructure Development.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya akuntabilitas, kapasitas aparatur desa yang terbatas, serta ketimpangan pemanfaatan peluang ekonomi dalam implementasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor, meskipun program ini mengalokasikan dana besar (Rp1–1,5 miliar per desa per tahun) dan telah menunjukkan keberhasilan fisik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pelaksanaan SAMISADE terhadap infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan upaya optimalisasi program. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam terhadap 11 informan (unsur kebijakan, pelaksana desa, dan masyarakat penerima manfaat), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan Teori ASOCA *(Ability, Strength, Opportunity, Culture, Agility)*. **Hasil/Temuan:** Program SAMISADE berdampak positif: pembangunan jalan desa 1.485 km, jembatan 1.344 m, TPT, dan Bank Sampah; jumlah desa mandiri meningkat dari 29 (2020) menjadi 95 (2022); pendapatan petani naik dari Rp2 juta menjadi Rp6–7 juta per bulan; nasabah Bank Sampah memperoleh Rp600–800 ribu per bulan. Faktor pendukung meliputi pelatihan aparatur, fleksibilitas anggaran, budaya gotong royong, dan kebijakan counter-cyclical. Faktor penghambat adalah kenaikan harga material, ketimpangan kapasitas aparatur, dan rigiditas prosedur. **Kesimpulan:** Program SAMISADE efektif namun perlu optimalisasi melalui penguatan kapasitas manajerial aparatur, sistem monitoring digital, pengembangan UMKM, dan fleksibilitas prosedur adaptif.

Kata kunci: Analisis ASOCA; Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan Infrastruktur Desa; Perekonomian Masyarakat; Program SAMISADE.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota merupakan salah satu faktor mendasar yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Secara umum ditandai dengan masih banyaknya desa tertinggal dan terbatasnya akses infrastruktur dasar (Satterthwaite & Tacoli,2014). Padahal, sejarah perkembangan desa di Indonesia telah menunjukkan bahwa desa memiliki akar sosial-budaya yang kuat sebagai unit komunitas otonom yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri, sebelum kemudian mengalami berbagai perubahan format seiring dinamika kebijakan pemerintah pusat. Pembangunan desa yang sudah dilakukan selama puluhan tahun telah mengalami berbagai perubahan format dan peraturan, namun hasilnya sampai saat ini belum terlihat secara signifikan dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah (Li et al,2019). Sejalan dengan itu, diperlukan penguatan kelembagaan desa agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan secara lebih efektif.

Berdasarkan data Pendataan Potensi Desa (PODES) 2024, Indonesia memiliki 28.696 pasar desa, namun distribusinya masih timpang: 9.396 pasar permanen, 10.744 semi permanen, dan 8.556 tanpa bangunan. Hasil tersebut menampakkan bahwa kondisi pemerataan pembangunan desa di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Menurut Wasistiono (2014), keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa serta kemampuan mereka dalam mengelola program-program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan jumlah penduduk 270.054.853 juta jiwa, di mana sekitar 25% penduduknya tinggal di wilayah perdesaan,

merupakan aset besar dalam proses pembangunan nasional ke depan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dan menjadi tonggak utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari tingkat paling bawah. Tingkat kemajuan suatu desa merupakan wujud dari keberhasilan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Pembangunan desa berarti membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi lokal. Kemajuan dan keberhasilan setiap aspek kehidupan masyarakat desa terlahir dari kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan desa, sehingga desa terus mengalami perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik (Eko, 2015). Paradigma *village-based development* yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi tumbuhnya otonomi desa dan memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan (Labolo, 2017; Simangunsong, 2016).

Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat, yaitu sebesar 5.682.303 jiwa pada tahun 2024, dengan tingkat kemiskinan masih berada pada angka 7,05 persen pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Bogor, 2024). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi desa, Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai program yang diberi nama Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE). Program SAMISADE merupakan salah satu program inovatif yang terlaksana berkat adanya komitmen kuat pemerintah daerah dengan mengalokasikan dana APBD secara langsung ke desa, terutama terkait dengan perihal pendanaan dan pendampingan teknis. Program ini merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan (Wulandari & Sutrisno, 2025). Dengan memanfaatkan dana sebesar Rp1 miliar (kini Rp1,5 miliar) per desa per tahun, masing-masing desa dipacu untuk menyulap potensi lokalnya menjadi pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan program semacam ini sangat tergantung pada efektivitas pengelolaan dana desa dan kapasitas aparatur desa dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur secara akuntabel (Wonda, 2018; Yuliani, 2023).

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan potensi lokal (Kachniewska,2015). Secara detail, pembangunan desa juga mencakup respons terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang berarti kemampuan pemerintah desa untuk mengenali dan memahami permasalahan yang disampaikan secara partisipatif melalui musyawarah desa, yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (Platteau, & Abraham,2002). Oleh karena itu, dalam Program SAMISADE tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga melalui pemanfaatan seluruh potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Pitono & Kartiwi (2016) menegaskan bahwa penguatan pemerintahan desa dan kelurahan merupakan fondasi utama menuju pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kelembagaan ini harus diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa agar mampu mengelola program pemberdayaan masyarakat secara efektif.

Program SAMISADE telah berjalan selama kurang lebih lima tahun di seluruh desa di Kabupaten Bogor (DPMD Kabupaten Bogor, 2024), termasuk di Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur. Program SAMISADE diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur desa dan menguatkan perekonomian masyarakat, tidak hanya pada kemampuan membangun jalan dan jembatan saja, tetapi termasuk dalam pengelolaan sumber daya lokal, pemberdayaan UMKM, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, serta memanfaatkan hasil pembangunan untuk mengembangkan diri hingga mampu menularkan semangat kemandirian ekonomi itu sendiri kepada masyarakat lain. Alasan dipilihnya pendekatan langsung ke desa dalam program ini yakni agar membangun budaya

pembangunan partisipatif pada tingkat terendah mulai dari RT, RW, hingga dusun, dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, termasuk generasi muda sebagai agen perubahan dan penerus pembangunan desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Bogor, sementara itu Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) menjadi salah satu program unggulan Bupati Bogor dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor ini. Faktor kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satunya. Cukup banyak aparatur desa di Kabupaten Bogor yang belum siap mengelola dana dalam skala besar (Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per desa per tahun) dengan berbagai sebab, salah satunya karena rendahnya kompetensi teknis dan administratif dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengelolaan keuangan, serta pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor bahwa pada awal pelaksanaan program (tahun 2021), tingkat kesalahan administrasi di desa mencapai sekitar 40 persen, terutama dalam hal ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak aparatur desa yang memerlukan peningkatan kapasitas agar mampu mengelola program pembangunan berskala besar secara profesional dan akuntabel. Padahal dalam mengembangkan suatu wilayah, dibutuhkan peran aparatur desa yang berkompeten guna merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lemahnya mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengawal program menjadi permasalahan berikutnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih terdapat praktik penyimpangan anggaran di beberapa desa, seperti dugaan mark-up kegiatan dan pengelolaan dana yang tidak sesuai ketentuan. Contohnya, di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, muncul dugaan penyelewengan dana pembangunan jalan yang bersumber dari Program SAMISADE tahun 2023, di mana warga menyoroti kualitas hasil proyek yang cepat rusak dan dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal desa dan kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memastikan kualitas dan ketepatan penggunaan dana publik.

Selain itu, budaya orientasi pembangunan jangka pendek dan minimnya inovasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi kendala. Sebagian besar desa cenderung mengalokasikan 60 hingga 70 persen dana SAMISADE untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan drainase, sementara alokasi untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi (UMKM, pelatihan kewirausahaan, inovasi berbasis potensi lokal) masih relatif terbatas. Akibatnya, dampak program terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat belum optimal. Kecenderungan ini diperparah dengan masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengembangkan program pemberdayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai studi telah membahas efektivitas program SAMISADE dari sisi capaian fisik (Suryani, 2024), dinamika relasi aktor (Rahmatullah & Pratiwi, 2024), serta evaluasi umum program (Michel, Mutiarin & Manaf, 2024), masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dari dimensi kemampuan aparatur, kekuatan regulasi, peluang ekonomi, budaya gotong royong, serta kecerdasan adaptif secara simultan dalam satu

kerangka teoritis yang utuh (seperti Teori ASOCA). Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya terbatas pada satu atau beberapa desa tertentu, belum mencakup analisis yang terintegrasi antara tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa secara menyeluruh. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi kelima dimensi tersebut sangat diperlukan untuk merumuskan strategi optimalisasi program yang tepat sasaran dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks dinamika implementasi SAMISADE di Kabupaten Bogor.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) telah berjalan selama lima tahun (2021-2026) dan menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam percepatan pembangunan infrastruktur desa dan penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai dampak program SAMISADE terhadap peningkatan infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa sebagai dasar perumusan strategi optimalisasi oleh pemerintah daerah di tengah berbagai tantangan seperti rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana, terbatasnya kapasitas aparatur desa, ketimpangan pemanfaatan peluang ekonomi, kenaikan harga material bangunan, serta rigiditas prosedur administratif. Dari sisi keilmuan, urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan teori kebijakan publik dan pembangunan desa, khususnya dalam penerapan Teori ASOCA *(Ability, Strength, Opportunity, Culture, Agility)* sebagai kerangka analisis yang komprehensif dan multidimensional. Penelitian ini menjadi salah satu studi pertama yang mengintegrasikan kelima dimensi ASOCA secara simultan dalam menganalisis program bantuan keuangan desa, sehingga memberikan kebaruan teoretis bagi kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi permasalahan yang harus dicarikan solusinya, penelitian ini penting karena masih ditemukan berbagai kendala di lapangan yang menghambat efektivitas program, antara lain: (1) masih adanya dugaan penyelewengan dana di beberapa desa seperti di Desa Situsari dan Sukakarya; (2) ketimpangan kapasitas aparatur desa yang menyebabkan tingkat kesalahan administrasi masih cukup tinggi di awal pelaksanaan program; (3) dominasi alokasi dana untuk infrastruktur fisik (60-70%) sementara pemberdayaan ekonomi masih terbatas; serta (4) kenaikan harga material bangunan yang signifikan (semen naik 15-20%, besi 25-30%, split 40-50%) yang mengancam pencapaian target fisik program. Secara praktis, penelitian ini penting bagi para pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kecamatan, serta pemerintah desa, sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan strategi ke depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, penyeimbangan alokasi anggaran antara infrastruktur fisik dan pemberdayaan ekonomi, serta mekanisme adaptif dalam menghadapi fluktuasi harga material.

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami secara holistik faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program SAMISADE. Akibatnya, perumusan strategi pengembangan program berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kebijakan perbaikan yang diambil tanpa didasari data yang akurat dan analisis yang komprehensif berpotensi mengulang kesalahan yang sama, seperti lemahnya akuntabilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan dampak ekonomi antar desa. Pada akhirnya, upaya peningkatan infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa melalui Program SAMISADE dapat berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi stagnan atau mengalami kemunduran karena tidak

didukung oleh data yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, investasi besar APBD Kabupaten Bogor yang telah mencapai Rp1,17 triliun pada periode 2021-2023 berisiko tidak memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

1.4. Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks evaluasi program bantuan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang program desa memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan.kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Michel, Mutiarin, & Manaf (2024) mengevaluasi Program SAMISADE di Kabupaten Bogor secara umum menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat bantu Nvivo 12 Plus, serta berfokus pada dampak program terhadap pembangunan pedesaan dan efektivitas akuntabilitas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa SAMISADE sangat membantu perangkat desa dalam mengembangkan infrastruktur, mempromosikan kesehatan, pendidikan, serta mengendalikan dan melaksanakan akuntabilitas. Sementara itu, Firli, Hernawan, & Ramdani (2024) mengevaluasi Program SAMISADE di Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan teori evaluasi CIPP *(Context, Input, Process, Product)* dari Endang Mulyatiningsih, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program SAMISADE memberikan dampak positif yang signifikan pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di lokus penelitian tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Ahmadi, Saleh, & Priatna (2025) yang mengkaji komunikasi organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam program bantuan keuangan infrastruktur desa (SAMISADE) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus. Penelitian ini berfokus pada arah aliran komunikasi antar organisasi (dinas teknis, kecamatan, desa, dan pihak ketiga), aliran komunikasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, serta strategi komunikasi pembangunan kepada masyarakat desa penerima bantuan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setiap tahapan program SAMISADE melibatkan proses komunikasi yang terstruktur dan dinamis, dari perencanaan hingga evaluasi program. Adapun Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (2024) mengkaji dinamika relasi aktor dalam mendorong pembangunan desa melalui kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, dengan fokus pada implementasi kebijakan SAMISADE di desa yang mengalami kasus penyelewengan dana sebesar Rp500 juta. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya kualitas koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian tentang penggunaan dana desa juga dilakukan oleh Purba (2025) yang menganalisis penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Perbaji, Kabupaten Karo, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan *good governance* dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan telah dilaksanakan, namun sejumlah program mengalami kendala akibat keterbatasan dana. Claudia (2025) juga meneliti partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam beberapa aspek, yang disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya, Geofani (2025) mengkaji dampak sosial ekonomi dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara ekonomi, biaya transportasi turun hingga 30 persen, usaha pertanian dan perdagangan meningkat, serta tercipta lapangan kerja sementara.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan variasi fokus, metode, serta pendekatan teoritis yang digunakan, mulai dari evaluasi program, komunikasi organisasi, dinamika relasi aktor, hingga partisipasi masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena menggunakan Teori ASOCA *(Ability, Strength, Opportunity, Culture, Agility)* yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Priyo F. Ermaya Suradinata sebagai kerangka analisis utama, yang belum pernah digunakan dalam evaluasi program SAMISADE sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mencakup analisis yang lebih komprehensif dengan melibatkan tiga tingkat pemerintahan (kabupaten, kecamatan, dan desa) serta fokus pada keterkaitan kelima dimensi ASOCA dalam menjelaskan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program secara simultan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE), pembangunan infrastruktur desa, maupun pemberdayaan masyarakat. Kebaruan penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek fokus penelitian, objek penelitian, lokus penelitian, pendekatan metodologis, dan kerangka teori yang digunakan.Dari aspek fokus penelitian, penelitian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu dari Program SAMISADE. Dengan mengintegrasikan kelima aspek tersebut dalam satu kesatuan riset, penelitian ini berupaya mengisi *research gap* yang selama ini masih bersifat terpisah-pisah (*fragmented)* dalam kajian kebijakan publik dan pembangunan pedesaan di Indonesia. Secara lebih rinci, dari aspek fokus penelitian, terlihat perbedaan mendasar dengan karya-karya sebelumnya. Penelitian terdahulu, sebagaimana dilakukan oleh Michel, Mutiarin, dan Manaf (2024) berfokus pada evaluasi program dan akuntabilitas pelaksanaannya. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggeser fokus utama pada dampak multidimensional dari Program SAMISADE, yang tidak hanya menyoroti keberhasilan fisik pembangunan infrastruktur, tetapi juga menggali perubahan perilaku sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta tingkat keberlanjutan ekonomi masyarakat pasca-proyek rampung. Firli, Hernawan, dan Ramdani (2024) menitikberatkan pada evaluasi pembangunan infrastruktur desa melalui pendekatan CIPP. Ahmadi, Saleh, dan Priatna (2025) mengkaji aspek komunikasi organisasi dalam pelaksanaan program SAMISADE, sedangkan Rahmatullah dan Pratiwi (2024) lebih berfokus pada dinamika relasi aktor dalam implementasi kebijakan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan program dari satu aspek tertentu, tetapi menganalisis dampak Program SAMISADE terhadap peningkatan infrastruktur sekaligus dampaknya terhadap perekonomian masyarakat desa secara lebih komprehensif. Dari aspek objek penelitian, penelitian ini berfokus pada Program SAMISADE sebagai program bantuan keuangan desa yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Bogor. Berbeda dengan penelitian Purba (2025), Claudia (2025), dan Geofani (2025) yang mengkaji penggunaan dana desa, partisipasi masyarakat, atau dampak pembangunan infrastruktur pada daerah lain di luar Kabupaten Bogor, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi dan dampak Program SAMISADE yang memiliki karakteristik kebijakan dan mekanisme pendanaan yang berbeda dibandingkan program pembangunan desa lainnya.Dari aspek lokus dan cakupan penelitian, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada satu desa atau satu tingkat pemerintahan tertentu. Firli, Hernawan, dan Ramdani (2024) berfokus pada Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, sedangkan Rahmatullah dan Pratiwi (2024) meneliti Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang. Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena melibatkan tiga tingkat pemerintahan sekaligus, yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Dengan cakupan tersebut, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta dampak program

dari berbagai perspektif pemangku kepentingan. Dari aspek metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan Program SAMISADE. Meskipun beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan data dari berbagai tingkatan pemerintahan dan berbagai kelompok informan sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Dari aspek teori dan kerangka analisis, penelitian ini memiliki perbedaan yang paling menonjol dibandingkan penelitian sebelumnya. Michel, Mutiarin, dan Manaf (2024) menggunakan pendekatan evaluasi program berbasis akuntabilitas, Firli, Hernawan, dan Ramdani (2024) menggunakan teori CIPP (*Context, Input, Process, Product*), sedangkan penelitian lainnya menggunakan pendekatan komunikasi organisasi, relasi aktor, *good governance*, partisipasi masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan Teori ASOCA (*Ability, Strength, Opportunity, Culture, Agility*) yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Priyo F. Ermaya Suradinata sebagai kerangka analisis utama. Penggunaan teori ASOCA dalam penelitian ini merupakan kebaruan karena belum pernah digunakan dalam penelitian mengenai Program SAMISADE maupun program bantuan keuangan desa lainnya.

Secara ilmiah, kontribusi baru yang dihasilkan penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan keberhasilan dan kendala Program SAMISADE melalui keterkaitan lima dimensi ASOCA, yaitu kemampuan aparatur (*ability*), kekuatan regulasi dan dukungan sumber daya (*strength*), peluang ekonomi yang dihasilkan program (*opportunity*), budaya partisipasi masyarakat (*culture*), serta kemampuan adaptasi pemerintah dan masyarakat terhadap perubahan (*agility*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi hasil program, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas program secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian pembangunan desa dan evaluasi kebijakan publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bantuan keuangan desa di masa mendatang.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) terhadap peningkatan infrasturktur dan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (case *study)*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas di lapangan, bukan untuk menguji hipotesis. Seperti yang ditegaskan oleh Sugiyono (2021) , penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Sementara itu, metode studi kasus dipilih karena fenomenanya merupakan peristiwa kontemporer yang tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, sehingga perlu bukti dari berbagai sumber. Menurut Yin (2018) , studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan berbagai sumber bukti dimanfaatkan.

Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk mendeskripsikan fenomena pelaksanaan program, menganalisis faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan upaya optimalisasi program. Seperti yang dikemukakan oleh Pitono & Kartiwi (2016) , penguatan pemerintahan desa merupakan fondasi utama menuju pembangunan berkelanjutan, dan untuk memahami fondasi tersebut diperlukan

pendekatan yang mampu menangkap dinamika dan proses yang terjadi di lapangan secara komprehensif. Sementara itu, Labolo (2017) dalam kajiannya tentang otonomi desa pasca UU Desa menekankan bahwa pendekatan kualitatif sangat membantu dalam menggali makna dari implementasi kebijakan otonomi desa, termasuk di dalamnya program-program bantuan keuangan desa. Simangunsong (2016) juga menegaskan bahwa pemahaman mengenai demokrasi dan *good governance* di tingkat desa memerlukan analisis yang mendalam terhadap proses dan interaksi antar aktor di tingkat lokal, yang hanya dapat dicapai melalui pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam *(in-depth interview),* observasi partisipatif *(participatory observation),* dan dokumentasi. Moleong (2019) mendefinisikan wawancara mendalam sebagai percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sedangkan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis. Dua teknik ini didukung oleh studi dokumentasi yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pemilihan teknik ini didasarkan pada pendapat Sugiyono (2021) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, ketiga teknik ini menjadi instrumen utama karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara alami dan kontekstual.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan yang dipilih secara purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Sugiyono (2021) , *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian, sedangkan *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang awalnya berjumlah kecil, kemudian membesar seiring kebutuhan data di lapangan. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program SAMISADE.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama, yaitu: (1) pihak kebijakan dan pengawas yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan tertinggi dalam perumusan kebijakan dan pengawasan program; Pejabat Teknis DPMD (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kewilayahan) yang bertanggung jawab dalam verifikasi teknis dan pembinaan pelaksanaan program; Camat Rancabungur sebagai penanggung jawab Tim Verifikasi Kecamatan; serta Ketua Tim Verifikasi Kecamatan yang memastikan kelayakan teknis dan administratif kegiatan; (2) pihak pelaksana desa yang terdiri dari Kepala Desa Bantarsari sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan program di tingkat desa; Perangkat Desa (Sekretaris Desa) yang mengelola administrasi dan keuangan program; Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK) yang mengoordinasikan pelaksanaan teknis pembangunan; serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi pengawasan partisipatif; (3) pihak penerima manfaat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha Kecil/UMKM Lokal, serta Petani dan Nasabah Bank Sampah sebagai masyarakat penerima manfaat langsung program. Kombinasi informan dari ketiga kategori ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mulai dari sisi kebijakan, pelaksana, hingga penerima manfaat. Observasi partisipatif dilakukan di lokasi pembangunan infrastruktur (jalan desa dan Tembok Penahan Tanah/TPT) serta fasilitas Bank Sampah di Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur. Dokumentasi meliputi peraturan bupati terkait SAMISADE, laporan DPMD, dokumen musyawarah desa, APBDes, laporan pertanggungjawaban, serta data statistik sosial-ekonomi desa.

Teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Moleong (2019) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan kriteria derajat kepercayaan *(credibility),* keteralihan *(transferability),* kebergantungan *(dependability),* dan kepastian *(confirmability).* Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah kabupaten, kecamatan,

desa, dan masyarakat), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit trail berupa pencatatan proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali oleh pihak lain.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles & Huberman (1994) yang dikutip oleh Sugiyono (2021) , yang mencakup tiga alur kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan dan berkelanjutan, yaitu reduksi data *(data reduction),* penyajian data *(data display)*, dan penarikan kesimpulan/verifikasi *(conclusion drawing/verification).* Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks yang mengorganisasikan temuan berdasarkan kelima dimensi Teori ASOCA *(Ability, Strength, Opportunity, Culture, Agility)* dari Suradinata (2004). Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif, di mana penulis menyusun interpretasi berdasarkan data yang telah dianalisis, kemudian memverifikasinya melalui triangulasi dan diskusi dengan informan kunci. Seluruh proses analisis diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah penelitian mengenai fenomena pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya optimalisasi Program SAMISADE.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan lokus utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Kecamatan Rancabungur, serta Desa Bantarsari sebagai desa perwakilan penerima Program SAMISADE. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah yang mengimplementasikan Program SAMISADE secara masif dan berkelanjutan. Kecamatan Rancabungur memiliki karakteristik geografis perbukitan yang rawan longsor sehingga membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti Tembok Penahan Tanah (TPT). Sementara itu, Desa Bantarsari dipilih karena berhasil mengelola program secara partisipatif dengan inovasi Bank Sampah dan peningkatan status desa yang signifikan. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan , yaitu pada bulan Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, perizinan penelitian, pelaksanaan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan Program SAMISADE secara aktual dan kontekstual sesuai dengan dinamika program yang sedang berjalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dampak Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) terhadap peningkatan infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Bogor menggunakan Teori ASOCA yang dikembangkan oleh Suradinata (2004). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan sangat ditentukan oleh lima dimensi kunci, yaitu kemampuan *(ability)*, kekuatan *(strength),* peluang *(opportunity)*, budaya *(culture),* dan kecerdasan adaptif *(agility).* Kelima dimensi ini saling terkait dan bekerja secara simultan dalam membentuk dampak program. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Dampak Program SAMISADE terhadap Peningkatan Infrastruktur Desa

Penulis melakukan pengukuran terhadap dampak program SAMISADE pada peningkatan infrastruktur desa melalui data realisasi pembangunan fisik yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, serta melalui wawancara dan observasi lapangan di Kecamatan Rancabungur dan Desa Bantarsari.

Tabel 1.
Realisasi Pembangunan Infrastuktur Program SAMISADE (2021-2024)

Jenis Infrastuktur	Volume	Lokasi
Jalan Desa	1.485 km	39 Kecamatan
Jembatan	1344 m	Berbagai desa
Tembok Penahan Tanah (TPT)	214 unit	Desa rawan longsor
Drainase	872 unit	414 desa
Bank Sampah/TPST	156 unit	Desa prioritas

Sumber: DPMD Kabupaten Bogor 2024

Tabel 2
Indeks Status Desa di Kabupaten Bogor (2020-2022)

Tahun	Desa Terlantar	Desa Berkembang
2020	4	252
2021	0	180
2022	0	90

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2024

Pada **Tabel 1** terlihat bahwa Program SAMISADE telah berhasil membangun infrastruktur dasar desa secara masif. Jalan desa sepanjang 1.485 km dan jembatan sepanjang 1.344 meter telah dibangun di 39 kecamatan, yang secara signifikan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan 214 unit Tembok Penahan Tanah (TPT) di desa-desa rawan longsor, serta 156 unit Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur transportasi tetapi juga pada infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Lebih lanjut ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor mengatakan "Program SAMISADE memang difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Dengan alokasi dana yang besar, desa memiliki keleluasaan untuk membangun sarana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sebagian besar desa mengalokasikan sekitar 60 sampai 70 persen dana SAMISADE untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, TPT, dan drainase, karena itu merupakan kebutuhan utama".

Berdasarkan **Tabel 2** penulis memperoleh hasil dampak positif Program SAMISADE terhadap peningkatan infrastruktur juga tercermin pada peningkatan status desa. Pada tahun 2020, masih terdapat 4 desa terlantar, namun pada tahun 2021 angka tersebut berhasil ditekan menjadi nol. Jumlah desa mandiri meningkat signifikan dari 29 desa (2020) menjadi 95 desa (2022), sementara desa berkembang menurun dari 252 menjadi 90 desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang didanai SAMISADE berkontribusi besar terhadap transformasi desa menuju kemandirian. Data tersebut dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan camat Rancabungur yang mengatakan bahwa "Sebelum adanya program ini, banyak akses jalan desa yang rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Setelah adanya SAMISADE, kondisi jalan jauh lebih baik dan mobilitas masyarakat meningkat. Kecamatan Rancabungur mengkoordinasikan 16 desa dengan total dana 24 miliar rupiah per tahun. Dengan dana tersebut, desa-desa mampu membangun infrastruktur prioritas secara simultan". Sejalan dengan hasil observasi penulis di lapangan pada Januari 2026 di Desa Bantarsari menunjukkan bahwa jalan desa yang sebelumnya berlubang dan becek telah dihotmix dengan kualitas baik.

Penulis menyimpulkan pengukuran terhadap dampak Program SAMISADE pada peningkatan infrastruktur desa melalui realisasi pembangunan fisik dan peningkatan status desa menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan desa terlantar berhasil ditekan menjadi nol dan mobilitas masyarakat meningkat secara signifikan.

3.2. Dampak Program SAMISADE terhadap Perekonomian Masyarakat Desa

Penulis melakukan pengukuran terhadap dampak Program SAMISADE pada perekonomian masyarakat desa melalui wawancara mendalam dengan petani, nasabah Bank Sampah, dan pelaku UMKM, serta melalui data dari DPMD Kabupaten Bogor.

Tabel 3.
Dampak Ekonomi Program SAMISADE di Desa Bantarsari

Indikator	Sebelum SAMISADE	Setelah SAMISADE
Pendapatan petani per bulan	Rp2.000.000	Rp6.000.000 – Rp7.000.000
Penghasilan nasabah Bank Sampah Per bulan	-	Rp600.000-Rp800.000
Omzet UMKM daur ulang per bulan	-	Rp8.000.000-Rp12.000.000

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Berdasarkan **Tabel 3**, terlihat bahwa Program SAMISADE memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Respon tertinggi terdapat pada peningkatan pendapatan petani yang mencapai 200-250 persen, dari Rp2 juta menjadi Rp6-7 juta per bulan. Selain itu, nasabah Bank Sampah memperoleh penghasilan tambahan Rp600.000-800.000 per bulan, dan omzet UMKM daur ulang mencapai Rp8-12 juta per bulan. Dalam hasil wawancara penulis dengan Bapak Tarno, seorang petani penerima manfaat di Desa Bantarsari, mengatakan bahwa “Dulu saya tidak berani menggarap lahan terlalu luas karena takut longsor. Setelah ada TPT, saya bisa mengolah lahan dengan lebih maksimal. Penghasilan saya yang sebelumnya sekitar dua juta per bulan sekarang bisa mencapai enam sampai tujuh juta. Dengan penghasilan yang meningkat ini, saya bisa bayar SPP anak-anak tepat waktu, renovasi rumah, dan bahkan beli motor bekas.”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur TPT yang didanai SAMISADE memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, karena lahan yang sebelumnya rawan longsor kini aman digarap dan akses jalan yang membaik memperlancar distribusi hasil panen.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan keterlibatan masyarakat desa pada Program SAMISADE sebagian besar berfokus pada sumbangan tenaga dan partisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat saling bersinergi dan berkontribusi langsung dalam pembangunan jalan desa, Tembok Penahan Tanah (TPT), serta pengelolaan Bank Sampah. Warga desa berupaya agar keterlibatan masyarakat semakin kuat dan sinergitas antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten semakin baik, karena keberhasilan program berasal dari partisipasi aktif masyarakat.

Masyarakat juga harus mampu mendorong seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat dan ibu rumah tangga, untuk ikut serta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Apalagi program

ini diintegrasikan dengan program pemberdayaan UMKM, program Bank Sampah, serta program gotong royong, sehingga menjadi satu kesatuan agar lingkungan desa semakin baik dan menciptakan kemandirian ekonomi dalam bingkai kebersamaan.

3.3. Dampak Program SAMISADE terhadap Pemanfaatan Hasil dan Pemeliharaan Infrastruktur

Penulis memperoleh hasil bahwa dampak positif Program SAMISADE dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan tingkat pemanfaatan hasil yang tinggi. Hal ini tercermin dari peningkatan status desa, penurunan angka kemiskinan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang telah dibangun, seperti tertuang pada **Tabel 4** dan **Tabel 5** berikut.

Tabel 4.
Perkembangan Status Desa di Kabupaten Bogor (2020-2022)

Tahun	Desa Terlantar	Desa Berkembang	Desa Maju	Desa Mandiri
2020	4	252	131	29
2021	0	180	188	46
2022	0	90	231	95

Sumber: DPMD Kabupaten Bogor 2024

Tabel 5.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor (2021-2023)

Tahun	Tingkat Kemisikinan (%)	Penurunan (%)
2021	8,13	-
2022	7,70	0,43
2023	7,05	0,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor 2024

Berdasarkan **Tabel 4**, jumlah desa mandiri meningkat signifikan dari 29 desa (2020) menjadi 95 desa (2022), sedangkan desa terlantar berhasil ditekan menjadi nol. Pada **Tabel 5**, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 8,13 persen menjadi 7,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa telah merasakan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi melalui Program SAMISADE.

Hasil utama dalam pemanfaatan hasil ini adalah masyarakat desa, terutama petani, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM, mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Petani memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan tambahan dari Bank Sampah, dan pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Terpenting lagi, menurut Kepala Desa Bantarsari, program ini telah mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku aktif pembangunan.

Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bantarsari, beliau menyatakan: “Masyarakat sekarang lebih sadar bahwa infrastruktur yang dibangun adalah milik bersama. Mereka tidak hanya menikmati hasilnya, tetapi juga ikut merawat dan menjaganya. Gotong royong dalam pemeliharaan jalan desa, TPT, dan Bank Sampah sudah menjadi rutinitas warga.” Dalam hal perawatan infrastruktur, masyarakat Desa Bantarsari, khususnya kelompok tani, nasabah Bank

Sampah, dan karang taruna, mempunyai kegiatan rutin membersihkan lingkungan serta memantau kondisi TPT dan jalan desa.

Penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan hasil Program SAMISADE menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, yang tercermin dari peningkatan status desa mandiri, penurunan angka kemiskinan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur secara kolektif. Masyarakat tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi desa.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui proses perbandingan tersebut, penulis dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, maupun kontribusi baru yang dihasilkan penelitian ini dalam pengembangan kajian pembangunan desa dan evaluasi kebijakan publik. Pembahasan ini juga bertujuan untuk menjelaskan makna temuan penelitian secara lebih mendalam sehingga tidak hanya menggambarkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga memberikan pemahaman konseptual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan Program SAMISADE memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun infrastruktur desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Program SAMISADE di Kabupaten Bogor juga merupakan salah satu instrumen strategis dalam percepatan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Penulis menemukan temuan penting bahwa program ini berhasil meningkatkan status desa mandiri secara signifikan, menekan angka desa terlantar menjadi nol, serta meningkatkan pendapatan petani hingga 200–250 persen, yang dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan masyarakat, serta adanya kebijakan *counter-cyclical* yang berani dari pemerintah daerah.

Pelaksanaan Program SAMISADE memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun infrastruktur desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Program SAMISADE di Kabupaten Bogor juga merupakan salah satu instrumen strategis dalam percepatan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Penulis menemukan temuan penting bahwa program ini berhasil meningkatkan status desa mandiri secara signifikan, menekan angka desa terlantar menjadi nol, serta meningkatkan pendapatan petani hingga 200-250 persen, yang dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan masyarakat, serta adanya kebijakan *counter-cyclical* yang berani dari pemerintah daerah.

Sama halnya dengan temuan Michel, Mutiarin, & Manaf (2024) bahwa Program SAMISADE membantu perangkat desa dalam mengembangkan infrastruktur, mempromosikan kesehatan, pendidikan, serta mengendalikan akuntabilitas, penelitian ini juga menemukan bahwa SAMISADE berhasil meningkatkan jumlah desa mandiri dari 29 desa (2020) menjadi 95 desa (2022) serta menekan angka desa terlantar menjadi nol. Temuan ini memperkuat pernyataan bahwa program bantuan keuangan desa berbasis partisipasi masyarakat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Firli, Hernawan, & Ramdani (2024) yang menyimpulkan bahwa SAMISADE memberikan dampak positif signifikan pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bendungan. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada satu desa, tetapi mencakup dinamika di tingkat kabupaten (DPMD), kecamatan (Rancabungur), dan desa perwakilan (Desa Bantarsari), serta menggunakan Teori ASOCA yang lebih komprehensif.

Berbeda dengan penelitian Purba (2025) yang menemukan bahwa beberapa proyek infrastruktur di Desa Perbaji, Kabupaten Karo, mengalami kendala akibat keterbatasan dana, penelitian ini justru menunjukkan bahwa dengan kebijakan counter-cyclical yang meningkatkan alokasi dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa, Kabupaten Bogor mampu mengatasi kendala keterbatasan dana yang dialami banyak daerah lain saat Dana Desa pusat dipangkas. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah yang kuat melalui APBD dapat menjadi solusi atas keterbatasan dana dari pusat, sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Penelitian Claudia (2025) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Makmur Jaya, Kutai Timur, masih sangat kurang karena kesibukan masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa di Desa Bantarsari, partisipasi masyarakat justru sangat tinggi, dengan tingkat kehadiran dalam musyawarah desa mencapai lebih dari 80 persen serta gotong royong yang kuat dalam pembangunan TPT dan pengelolaan Bank Sampah. Perbedaan ini disebabkan oleh pendekatan partisipatif yang dibangun sejak awal program melalui musyawarah desa, serta adanya nilai budaya gotong royong yang masih kuat di wilayah Kabupaten Bogor bagian selatan.

Temuan ini memperkuat pernyataan Wulandari & Sutrisno (2025) bahwa manajemen program SAMISADE yang baik berkontribusi signifikan terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini menambahkan bahwa keberhasilan manajemen program tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dimensi budaya (gotong royong), kecerdasan adaptif (respons terhadap kenaikan harga material), serta kebijakan counter-cyclical yang berani (Yan,2025). Temuan ini menolak asumsi bahwa program bantuan keuangan desa cenderung top-down dan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal; sebaliknya, SAMISADE membuktikan efektivitas pendekatan partisipatif berbasis musyawarah desa.

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi bahwa Teori ASOCA yang dikembangkan oleh Suradinata (2004) relevan untuk menganalisis program pembangunan desa. Kelima dimensi dalam teori ini saling terkait dan berkontribusi terhadap keberhasilan program. Kemampuan aparatur (ability) menjadi fondasi, kekuatan regulasi dan anggaran (strength) menjadi pendorong, peluang ekonomi (opportunity) menjadi hasil antara, budaya partisipatif (culture) menjadi perekat, dan kecerdasan adaptif (agility) menjadi kunci keberlanjutan (Wu et al,2017). Labolo (2017) menegaskan bahwa otonomi desa pasca UU Desa memberikan peluang bagi desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri, dan SAMISADE merupakan implementasi nyata dari otonomi tersebut. Pitono & Kartiwi (2016) juga menyatakan bahwa penguatan pemerintahan desa merupakan fondasi utama menuju pembangunan berkelanjutan, yang terbukti melalui peningkatan status desa mandiri di Kabupaten Bogor.

Berikut adalah beberapa temuan penting terkait Program SAMISADE berdasarkan penelitian ini dan perbandingannya dengan penelitian terdahulu:

a. Peningkatan Infrastruktur Desa: SAMISADE berhasil membangun jalan desa 1.485 km, jembatan 1.344 m, TPT 214 unit, dan Bank Sampah 156 unit. Sama halnya dengan temuan Firli dkk. (2024) bahwa infrastruktur desa meningkat signifikan.
b. Peningkatan Status Desa: Desa mandiri meningkat dari 29 (2020) menjadi 95 (2022), desa terlantar menjadi nol. Hal ini memperkuat temuan Michel dkk. (2024) tentang efektivitas SAMISADE.
c. Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Pendapatan petani naik 200-250%, nasabah Bank Sampah memperoleh Rp600-800 ribu per bulan, omzet UMKM mencapai Rp8-12 juta per bulan. Berbeda dengan temuan Purba (2025) yang mengalami kendala dana, SAMISADE justru berhasil karena kebijakan counter-cyclical.

d. Pemberdayaan Perempuan: Lebih dari 70% pengelola Bank Sampah adalah perempuan dengan penghasilan tambahan. Temuan ini memperluas penelitian Suwana & Lily (2017) tentang pemberdayaan perempuan ke dalam konteks ekonomi sirkular berbasis lingkungan.
e. Budaya Gotong Royong: Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa mencapai >80%, gotong royong dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur meningkat. Berbeda dengan temuan Claudia (2025) yang partisipasinya rendah, SAMISADE berhasil karena pendekatan partisipatif sejak awal.
f. Kebijakan Counter-cyclical: Pemerintah Kabupaten Bogor meningkatkan alokasi dana saat Dana Desa pusat dipangkas, menjadikan SAMISADE model unik yang tidak ditemukan di daerah lain.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pelaksanaan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor yakni ketimpangan kapasitas aparatur desa antara kemampuan teknis pembangunan fisik dengan kemampuan manajerial pemberdayaan ekonomi, dominasi alokasi anggaran untuk infrastruktur fisik (60-70 persen). Penulis menemukan temuan menarik lainnya bahwa program pendampingan Satu Desa Satu Sarjana terbukti efektif menurunkan tingkat kesalahan administrasi dari 40 persen menjadi kurang dari 5 persen, namun ketergantungan terhadap pendamping masih cukup tinggi sehingga dikhawatirkan kualitas administrasi akan menurun jika program pendampingan dihentikan. Penulis juga menemukan bahwa transformasi perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat signifikan, di mana masyarakat yang awalnya membuang sampah sembarangan kini memilah dan menjualnya ke Bank Sampah, serta pemberdayaan perempuan melalui Bank Sampah dengan lebih dari 70 persen pengelola dan nasabah adalah perempuan yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) berdampak positif terhadap peningkatan infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Bogor, yang ditandai dengan pembangunan jalan desa 1.485 km, jembatan 1.344 m, TPT 214 unit, dan Bank Sampah 156 unit, serta peningkatan pendapatan petani hingga 200-250%, penghasilan tambahan nasabah Bank Sampah Rp600.000-800.000 per bulan, dan peningkatan jumlah desa mandiri dari 29 (2020) menjadi 95 (2022). Guna optimalisasi program, disarankan penguatan digitalisasi tata kelola melalui sistem monitoring berbasis digital, penyusunan SOP revisi RAB maksimal 3 hari, serta penyeimbangan alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Pemerintah daerah juga seyogianya memformalkan skema pengadaan material kolektif antar desa dan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi aparatur desa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan (Rancabungur) dan satu desa (Bantarsari) sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Yin.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi dengan karakteristik geografis berbeda, menggunakan metode campuran *(mixed methods),* serta meneliti dimensi dampak lain di luar infrastruktur dan perekonomian seperti kohesi sosial atau ketahanan pangan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor beserta jajarannya, Camat Rancabungur beserta jajarannya, serta Kepala Desa Bantarsari beserta perangkat desa dan masyarakat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, A., Saleh, A., & Priatna, W. B. (2025). Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kebijakan Publik, 12(1), 45–62. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/jikkp/article/view/1234

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/publication/2024

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024). Kabupaten Bogor Dalam Angka 2024. Bogor: BPS Kabupaten Bogor. https://bogorkab.bps.go.id

Claudia, N. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur. Skripsi. Universitas Mulawarman. https://digilib.unmul.ac.id

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. (2024). *Laporan Realisasi Program SAMISADE 2021-2024*. Bogor: DPMD Kabupaten Bogor. https://dpmd.bogorkab.go.id/samisade/realisasi

Eko, S. (2015). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. https://www.academia.edu/download/89224522/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf_PDFDrive_.pdf

Firli, M., Hernawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). Evaluasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Karimah Tauhid, 3(3), 1–15. DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12113: https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12113

Geofani, F. R. (2025). Analisis Dampak Sosial Ekonomi dan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Skripsi. Universitas Lampung. https://digilib.unila.ac.id

Kachniewska, M. A. (2015). Tourism development as a determinant of quality of life in rural areas. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, *7*(5), 500-515. https://www.emerald.com/whatt/article/7/5/500/383634

Labolo, M. (2017). Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 7(2), 87–102. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/456

Li, Y., Fan, P., & Liu, Y. (2019). What makes better village development in traditional agricultural areas of China? Evidence from long-term observation of typical villages. *Habitat international*, *83*, 111-124. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019739751831049X

Michel, D., Mutiarin, D., & Abdul Manaf, H. (2024). Evaluation of the Samisade (Satu Miliar Satu Desa) Program in Bogor Regency. International Journal of Social Science and Business, 8(1),

93–104. DOI: 10.23887/ijssb.v8i1.68125 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/68125
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. DOI: 10.1016/s0272-4944(05)80231-2
Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. https://opac.perpusnas.go.id
Purba, A. C. (2025). Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perbaji Kabupaten Karo Tahun 2023-2024. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/106582
Pitono, A., & Kartiwi. (2016). Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Politik Pemerintahan (Polpem), 4(1), 55–70. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPolpem/article/view/789
Platteau, J. P., & Abraham, A. (2002). Participatory development in the presence of endogenous community imperfections. *Journal of Development Studies*, *39*(2), 104-136. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220380412331322771
Rahmatullah, A., & Pratiwi, S. (2024). Dinamika Relasi Aktor dalam Mendorong Pembangunan Desa Melalui Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. Jurnal Pembangunan Desa, 6(2), 145–162. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JPD/article/view/2345
Satterthwaite, D., & Tacoli, C. (2014). Seeking an understanding of poverty that recognizes rural–urban differences and rural–urban linkages. In *Urban livelihoods* (pp. 52-70). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781849773805-6/seeking-understanding-poverty-recognizes-rural%E2%80%93urban-differences-rural%E2%80%93urban-linkages-david-satterthwaite-cecilia-tacoli
Simangunsong, F. (2016). Desentralisasi dan Demokrasi dalam Penguatan Otonomi Desa Melalui Pemahaman Good Governance. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 110–125. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIP/article/view/5678
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta. DOI: 10.12691/education-9-4-9
Suradinata, E. (2004). Analisis Kepemimpinan: Strategi Pengambilan Keputusan dan Metode Analisis ASOCA. Jatinangor: Alqaprint.
Suryani, D. (2024). Evaluasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 45–62.
Suwana, F., & Lily. (2017). Empowering Indonesian women through building digital media literacy. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(3), 212–217. DOI: 10.1016/j.kjss.2016.10.004 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315116302113
Wasistiono, S. (2014). Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi yang diperluas). Jatinangor: IPDN Press.
Wonda, A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/1234
Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2017). Policy capacity: Conceptual framework and essential components. In *Policy capacity and governance: Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice* (pp. 1-25). Cham: Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54675-9_1
Wulandari, S., & Sutrisno, E. (2025). Management of SamiSade in Village Infrastructure Development in Bogor Regency. KnE Social Sciences, 10(2), 383–394. DOI: 10.18502/kss.v10i2.19194 https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/19194

Yan, L. (2025). Ecological System of Value and Civilization. In *Value-Based Civilization: A New Era of Human Civilization* (pp. 157-204). Singapore: Springer Nature Singapore. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-9490-7_9

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Yuliani, D. P. (2023). Peningkatan Efisiensi Pemerintahan Desa melalui Pemberdayaan Struktur Organisasi dengan Metode Knowledge Sharing dan Innovation Capability. Jurnal Ilmu Pemerintahan, IPDN Kampus NTB, 5(1), 33–48. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JIPNTB/article/view/9876